



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 April 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL
SUB UNIT KERJA : BIRO UMUM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MULYONO
2. Jabatan : KEPALA BIRO UMUM
3. NHK : 111990

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp.

3.027.000.000

1. Tanah Seluas 175 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 875.000.000
2. Tanah Seluas 140 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 112.000.000
3. Tanah Seluas 110 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 88.000.000
4. Tanah Seluas 410 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000
5. Tanah Seluas 114 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 342.000.000
6. Tanah Seluas 100 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
7. Tanah Seluas 100 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
8. Tanah Seluas 200 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

431.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AGYA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

D. SURAT BERHARGA

Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp.

773.944.153

F. HARTA LAINNYA

Rp.

Sub Total

Rp.

4.231.944.153



III. HUTANG

Rp.

144.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

4.087.944.153

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **19 Juli 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.